

**PERAN PKL BAGI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KOTA DAN
MASALAH RUANG PERKOTAAN : KASUS KOTA SEMARANG
(sebuah studi pendahuluan / preliminary studi)**

*Street-vending activities and its roles on urban economic growth and urban space
utilization problems : the case of Semarang Municipality
(a preliminary study)*

Sri Yuwanti

Staf Balitbang Propinsi Jawa Tengah

ABSTRACT

This research is about street-vending in Semarang Municipality, still a preliminary study. The research is held to gain a better understanding on the phenomenon, and to help the municipal government in designing policies concerned to the street-vending activities.

Semarang is one of Indonesia's big cities, that has similar problem as the other cities on managing street-vending. In this city, street-vending is formally managed by the municipal government, decentralized to its "kelurahan", the smallest unit administration of the city, similar to billage in the district. Total kelurahan of Semarang are 117, and total street-vendors listed are 7142, of which 4301 are officially permitted to operate in such locations. Many locations have been designated for the activities. Recently, the management operation is said to be centralized back by the municipal government because of the incapability of kelurahan administration. In reality, even though many street-vending activities are formally listed, there are more of them operate and have not permit, scatter elsewhere in the city and hardly to be controlled. The problems are usually linked to the deterioration of city infrastructures, over utilization, or cross the function of city space. The action taken by the government usually are trying to get rid of them by force or dislocate them. Hopefully, this study will be able to give a better understanding on the nature of street-vending and its roles in the urban economics and on how and why the Semarang Municipal government give a better access for them.

Key word : *street-vending, informal sectors, municipal management, spatial economics.*

PENDAHULUAN

Istilah kaki lima sudah dikenal sejak jaman Napolen menguasai benua Eropa dan daerah koloni Belanda di Asia dibawah administrasi pemerintah Inggris. Pada saat

itu, Sir Thomas Raffles menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia dan menginstruksikan sistem lalu lintas jalan raya di sebelah kiri, serta sekaligus mengeluarkan peraturan bahwa di tepi jalan raya harus dibuat trotoir

untuk pejalan kaki, dengan tinggi 31 dm dan lebar sekitar 150 cm atau "five feet". Dari kata "five feet" tersebut muncul istilah kaki lima. (Schoch, 1986, hal. 3).

Secara fisik, di lokasi pemukiman, kaki lima dapat berupa bangunan trotoir, atau "emperan" luar di depan rumah, karena rumah orang Indonesia rata-rata sangat dekat dengan jalan. Di desa, kaki lima tersebut ada yang diberi atap untuk tempat duduk di siang hari atau malam hari. Di perkotaan, di depan rumah atau bangunan gedung perkantoran, bangunan fisik kaki lima, atau 'lahan' yang seharusnya digunakan untuk fungsi kaki lima, yaitu untuk pejalan kaki, banyak dipakai untuk berdagang. Perdagangan tersebut dikenal dengan sebutan perdagangan kaki lima, dan pedagangnya disebut pedagang kaki lima, disingkat dengan PKL.

Perdagangan kaki lima selalu diidentikkan dengan usaha skala kecil, dan diklasifikasikan sebagai bagian sektor informal. Lokasi usaha perdagangan kaki lima pada kenyataannya menyebar ke tempat yang padat penduduk, terutama di pusat kota. Bentuk usaha di kaki lima tersebut tidak hanya perdagangan barang dan makanan, tetapi meliputi juga perdagangan jasa, misalnya agen tiket bis malam atau kapal, tukang cukur, bengkel, angkutan (pangkalan ojek, becak) dll. Namun demikian, dari pengamatan awal, sebagian besar PKL terdiri dari pedagang makan siap saji atau makanan yang dimasak di tempat tersebut. Dalam perkembangan istilah, pedagang kaki lima juga menjadi sebutan bagi mereka yang menempati lahan kaki lima secara permanent, semi permanent bertenda, shift-time, serta bagi pedagang keliling, baik 'pikulan', 'gendongan', dorongan, maupun dengan kendaraan bermotor roda 2,

roda 3 atau roda 4.

Dipandang dari sisi ekonomi, perdagangan kaki lima mengisi struktur fungsi yang kosong dan diperlukan oleh masyarakat tingkat bawah, sebagai tempat mencari barang dan jasa bagi konsumen, maupun sebagai tempat menawarkan barang dan jasa bagi produsen. Secara umum, cara berdagang seperti ini masih akan tetap berlangsung, baik di Indonesia, maupun tempat lain yang mempunyai tingkat ekonomi sudah maju, selama masih ada kebutuhan (demand). Fungsi memenuhi kebutuhan untuk kelompok masyarakat tertentu inilah yang tidak akan dapat digantikan oleh supermarket, mall, departemen store, atau restoran dan toko-toko formal yang sudah ada. Bagi kelompok tertentu, tempat-tempat yang disebut diatas dapat dijadikan sebagai perbandingan, namun karena mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan nyata di PKL. Sedangkan logika, kelompok tersebut akan selalu ada di tingkat peradaban manapun juga, terutama di daerah padat penduduk. Secara ekonomi, PKL adalah jalan keluar di masa krisis dan penyelamat ekonomi.

Pernah ada pendapat bahwa keberadaan pabrik dengan produksi massal dan pengemasan barang dengan plastik dll akan menghilangkan cara perdagangan ini (Ibid, hal 63). Namun kenyataannya, yang berubah hanya jenis barang dagangan. Apabila barang mainan anak yang di jajakan PKL pada jaman dahulu dibuat dari kaleng bekas atau kayu, saat ini barang mainan tersebut dibungkus palstik dan dibuat dari karet atau plastik. Fungsi PKL justru bertambah menjadi tempat promosi dan distribusi barang produksi buatan pabrik-

pabrik baru, yang tidak bermerek, belum dikenal masyarakat, atau buatan pengusaha-pengusaha kecil menengah, home industri, (UKM) yang memerlukan tempat pemasaran hasil produksi mereka. PKL tidak semakin hilang, melainkan semakin berkembang dari sisi jenis barang dagangan dan berfungsi sebagai kepanjangan tangan, atau penjual perantara bagi produsen rumahan, tempat promosi hasil industri tertentu, dan tempat 'testing jual' untuk barang industri baru.

Dipandang dari sisi perkembangan fisik kota atau penataan kota, perdagangan kaki lima yang berkembang tidak beraturan dan mengganggu fungsi jalan raya, pemakaian lahan yang tidak sah oleh sebagian besar pedagang, serta kurangnya mereka memperhatikan kebersihan tempat usaha, merupakan *kesalahan situasi* yang perlu dikoreksi. Namun apa dan dari tingkat mana koreksi tersebut perlu dilakukan, serta tanggung jawab siapa, masih perlu dicari. Hal ini sangat penting karena masalah PKL adalah masalah tradisional negara berkembang, yang dapat juga terjadi di negara maju, selalu muncul dan selalu ditangani dengan cara-cara yang sama, tetapi tidak pernah selesai. Yang diperlukan adalah memahami akar masalahnya, menemukan kunci strategisnya, dan tindakan penanganan tidak hanya untuk mengobati gejalanya.

Banyak sisi kehidupan dan faktor perkembangan kota yang terkait dan diperkirakan menjadi titik strategis dalam upaya memahami masalah PKL. Faktor yang nyata terkait adalah : over employment, over urbanisasi, kemiskinan, keterbatasan lahan, pemanfaatan fungsi ruang yang berimpitan dan kemungkinan saling bertentangan, konflik sosial antar kelompok ekonomi,

gangguang terhadap ruang publik tertentu, dan overutilisasi prasarana umum.

Dari sisi ekonomi, PKL menjadi penyelamat karena menampung pengangguran, memutar modal dalam bentuk usaha meskipun dengan cara yang informal. Pedagangnya merupakan wirausaha murni karena sifat informalnya menyebabkan tidak ada campur tangan pemerintah baik dalam bentuk bantuan kredit, bantuan tempat, maupun penarikan pajak resmi.

Dalam keterbatasan kapasitas tampung kota, mahalnnya harga sewa tanah, semakin tingginya mobilitas penduduk, perkembangan modal transportasi secara kuantitas dan jenis, keberadaan perdagangan kaki lima terutama yang permanen dan semi permanen dapat dianggap sebagai *kejahatan* karena tidak mempunyai ijin usaha yang sah secara aturan, mencuri ruang publik, memperburuk tingkat kemacetan jalan raya, mencemari lingkungan, dan merusak wajah kota. Lebih-lebih lagi bila cara perdagangan ini disalahgunakan untuk perdagangan "bawah tanah", al. peredaran barang ilegal seperti judi togel, uang palsu, pelacuran terselubung, narkoba, penyelundupan senjata, dll. Kelompok PKL sering dijadikan lahan penarikan "pajak gelap" oleh sekelompok preman, dan kadang secara sengaja dipelihara keberadaanya oleh pihak tertentu untuk dijadikan obyek "pendapatan".

Penanganan secara keras terhadap PKL dengan pengusuran oleh petugas yang berwenang sering dilakukan. Namun dibalik itu, sejalan dengan sifat informalnya, tidak ada peraturan yang mengatur khusus tentang PKL dan PKL tidak dapat dikenai peraturan umum, sehingga alasan yang dijadikan dasar pengusuran atau penertiban adalah :

mengganggu ketertiban umum.

Penelitian ini adalah mengenai perdagangan kaki lima di kota besar, dalam hal ini kota Semarang. Tujuan riset ini adalah untuk mencari informasi tentang PKL dan memahami kegiatan ini sebagai bagian kegiatan ekonomi masyarakat kota yang dapat menyebabkan berbagai dampak fisik ruang, sosial, maupun ekonomi dalam proses perkembangan kota. Diharapkan dengan diketahuinya karakteristik PKL dan pola operasinya, pengambil kebijakan pemerintah kota Semarang dapat memanfaatkannya dalam upaya penataan. Penataan PKL dengan cara terencana maupun dengan cara penertiban sudah sering dilakukan oleh pemerintah kota Semarang, karena hal tersebut merupakan keharusan bagi pemerintah kota yang menginginkan semua komponen kota teratur dan bergerak dalam sistem kota yang terencana. Meskipun demikian, perkembangan yang terjadi telah diluar kontrol, bersamaan dengan tingginya animo sekelompok anggota masyarakat untuk menjadi pedagang kakilima atau berbelanja di kaki lima.

Penelitian terhadap peran PKL dan masalahnya ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kemampuan bertahan pada situasi yang paling sulit, dimana mereka harus hidup dalam ketidakpastian usaha dan selalu dalam pengawasan ketat pihak keamanan dan ketertiban kota. Faktor-faktor yang akan diteliti antara lain : lokasi, bentuk fisik tempat usaha, cara berdagang, jenis barang dagangan, modal, tenaga kerja, dan total waktu yang digunakan untuk berusaha. Faktor ini akan dikaitkan dengan penggunaan sarana dan ruang kota, dan dilihat perubahan

fungsi sarana dan ruang yang terjadi. Responden utama adalah PKL, sedangkan responden lain adalah stakeholder kota, yang mungkin diuntungkan atau dirugikan oleh keberadaan PKL.

Hal yang perlu diketahui antara lain *batasan* tentang PKL dan klasifikasinya oleh pemerintah kota dan oleh PKL, faktor pilihan usaha dilihat dari pilihan jenis barang jasa yang ditawarkan, pilihan tempat usaha, faktor pemilikan modal, lama berusaha, asal pengusaha/pedagang, tujuan usaha, serta persepsi terhadap kondisi usaha sendiri. Dikaitkan dengan masalah yang ditimbulkan diperkotaan, maka keberadaan PKL di suatu lokasi tertentu akan dilihat akibatnya pada kebutuhan ruang usaha, yang akan berimplikasi pada kebutuhan penataan kota yang layak huni dan kebutuhan pengaturan tempat publik yang nyaman dan aman. Perdebatan akan terjadi pada saat dilakukan penataan ulang terhadap ruang kota (*rezoning*), dengan *issue* : perlukah PKL diwadahi atau mereka harus dieliminasi ? Adakah kemungkinan status usaha mereka menjadi formal dalam kondisi perekonomian saat ini ? Ruang bagaimana yang dapat mereka pergunakan dan dialokasikan secara sah untuk mereka ? dll.

Jalan keluarnya tentu saja bukan hanya sekedar peraturan daerah (PERDA) melainkan tumbuhnya pemahaman dan kesadaran pada setiap anggota masyarakat, seluruh stakeholder kota, bahwa kota yang mereka tinggali bersama perlu dibentuk bersama dan dipelihara, tanpa harus mengorbankan kepentingan hidup yang paling dasar dari salah satu kelompok yang ada di kota.

BAHAN DAN METODA

Penelitian ini dilaksanakan secara mandiri di kota Semarang. Kota ini dipilih karena sebagai kota terbesar di Jawa Tengah dianggap dapat mempresentasikan masalah PKL dan persepsi mayoritas masyarakat Jawa Tengah. Metode penelitian yang dipilih adalah *deskriptif-kualitatif*, karena meskipun PKL masuk dalam kelompok ekonomi rakyat, namun lingkup penelitian ini adalah untuk memahami pilihan dan persepsi masyarakat secara sosiologis.

Penelitian awal dilakukan pada bulan mendekati akhir tahun dan hari raya, karena pada saat ini PKL banyak bermunculan, baik yang tiban maupun tetap tetapi berpindah. Penelitian lanjutan sedang dilaksanakan dan akan dilaporkan secara bertahap. Rentang waktu penelitian diperkirakan antara 1 sampai 2 tahun, karena kelompok yang diamati akan diikuti terus pergerakannya. Penelitian dimulai pada kuartal akhir tahun 2003.

Obyek dan responden penelitian ini adalah PKL, kelompok ekonomi lain yang berkaitan dengan PKL seperti industri barang tertentu, pemilik toko, pedagang pasar, dll; masyarakat konsumen dan non konsumen PKL, serta aparat pemerintah kota terutama yang terkait dengan tata kota, perdagangan/perekonomian, dan ketentraman dan ketertiban. Sample dipilih secara sengaja dan berstrata (*stratified purposive*) untuk kepentingan tertentu dalam upaya pemahaman terhadap hakekat dan masalah PKL.

Sarana prasarana umum kota dijadikan sebagai alat penjelasan karena kondisi mereka merupakan akibat dari kegiatan PKL dan merupakan sumber masalah yang

diangkat. Untuk itu dalam analisa nanti akan ditentukan mana yang merupakan *gejala* dan mana yang merupakan *akar masalah*.

Data yang diambil adalah primer dan sekunder, dimana primer diperoleh dari wawancara bebas terpandu, sedangkan sekunder diambil dari bahan laporan, data dokumen, dll. Cara mengolah dan menganalisa sesuai dengan metode kualitatif sebagaimana umumnya, dengan pilihan teori Urbanisasi, Ekonomi Perkotaan, Perancangan Kota dan Urban Sosiologi sebagai teori yang digunakan untuk mendasari konsepsi pikir.

Tahapan penelitian saat ini adalah pengumpulan data sekunder dari lokasi penelitian dan review literatur untuk membatasi topik penelitian, pilihan isue dan responden, serta penyiapan panduan wawancara sebelum melakukan penelitian lapangan. Tahapan berikutnya dimulai pada bulan Maret 2004, dengan pengumpulan nama dan alamat responden terpilih dan pendataan dengan panduan wawancara untuk lokasi tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Umum

Kota Semarang adalah kota di kawasan Pantura Jawa Tengah, berstatus sebagai Ibu kota propinsi Jawa Tengah dan telah berkembang sebagai kota pusat pemerintahan dan perdagangan. Ditunjang dengan pelabuhan laut Tanjung Emas, pelabuhan udara Ahmad Yani, stasiun kereta api Tawang dan terminal bis antar kota yang cukup sibuk, Semarang melayani wilayah Jawa Tengah bagian tengah ke selatan dan sebagian wilayah transit bagi transportasi darat dari

Jawa bagian barat ke timur dan sebaliknya.

Jumlah kecamatan di Semarang, sejak tanggal 19 Juni 1976 adalah 16 (sebelum tanggal tersebut jumlahnya 12, tambahan baru berasal dari perluasan wilayah sebanyak 4 kecamatan) dan terdiri dari 177 kelurahan. Penduduk kota Semarang pada tahun 2001 mencapai 1.329.669 jiwa, terdiri dari 671.316 laki-laki dan 658.352 perempuan dari semua umur. Jumlah penduduk usia produktif sekitar 70%. Pertumbuhan penduduk sebesar 1,43% pertahun. Perekonomian kota Semarang tersebar di sektor perdagangan, hotel dan restoran, sekitar 30-40% dari total PDRB. Sektor lain hanya menyumbang sekitar 7% sampai 28%.

(Data 1998. Belum ada data terbaru, dan akan diperbaiki angkanya kemudian). Data 1998 mencatat adanya pertumbuhan ekonomi negatif 24,62. Sangat besar kemungkinan angka ini berubah banyak karena pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara umum sejak tahun 2000 positif, dan Semarang bersama Surakarta dan Kudus diperkirakan menyumbang besar pada angka pertumbuhan positif tersebut.

Khusus

PKL dalam prakteknya adalah perdagangan, namun karena sifatnya yang informal kegiatan ini tidak tercatat di perhitungan PDRB sektor perdagangan. Secara teoritik PKL merupakan kegiatan residu dalam analisa pertumbuhan ekonomi daerah.

Batasan PKL masih bermacam-macam. Untuk awalnya dipergunakan batasan Kartono at oc. (198) yang dikutip oleh Alisyahbana (2003), sebagai berikut :

1. merupakan pedagang yang sekaligus juga produsen
2. menetap pada lokasi tertentu atau bergerak ke tempat lain menggunakan alat pikulan, dorongan, dan dengan tempat atau stand tidak permanen/ bongkar pasang.
3. yang dijual adalah barang makanan, minuman, dan barang konsumsi lain secara eceran.
4. umumnya bermodal kecil, kadang hanya alat untuk mendapat komisi.
5. kualitas barang dagangan rendah dan biasanya tidak berstandar
6. volume peredaran uang tidak seberapa dan pembiayaan juga berdaya beli rendah.
7. usaha skala kecil yang dapat saja merupakan usaha keluarga (anggota keluarga membantu usaha/sebagai tenaga kerja baik langsung atau tidak langsung).
8. relasi khasnya adalah tawar menawar antara pedagang dan pembeli
9. usahanya dapat merupakan usaha penuh, sampingan/setelah kerja lain/diwaktu senggang, dan dapat juga musiman (pada peristiwa tertentu).
10. barang dagangan merupakan *convenience goods*, jarang sekali *specialty goods*.
11. seringkali dalam suasana psikologi tidak tenang dan takut kalau tiba-tiba ditertibkan oleh aparat tribum.

Sebagian besar dari poin tersebut diatas adalah hal yang akan dilihat di lapangan dan menjadi bahan panduan wawancara, ditambah dengan beberapa hal yang juga

ingin didapatkan dari penelitian ini yaitu : persepsi PKL dan konsumen serta pandangan aparat tentang peran PKL bagi kotanya disegala bidang : ekonomi, sosial budaya dan fisik perkotaan.

Satu hal yang menarik dari kota Semarang adalah, PKL diwadahi secara resmi dikelola oleh kelurahan, dan jumlahnya dipantau secara berkala. Dari data sekunder yang dapat dikumpulkan, diketahui sentra-sentra PKL di seluruh wilayah Semarang, baik yang resmi maupun tidak resmi. (Resmi disini maksudnya tercatat dan berijin). Meskipun ada suara bahwa PKL perlu ditarik pengelolaannya di level kota (diatas

kecamatan), namun kelanjutan dari hal yang dapat dianggap sebagai bertentangan dengan prinsip otonomi dan pelibatan partisipasi masyarakat di tingkat bawah ini belum jelas. Yang pasti, ada kelomok lain yang terganggu kepentingannya keberadaan PKL, dan menarik untuk diketahui alasannya.

Untuk sementara, lokasi yang diambil sebagai unit observasi adalah lokasi dengan sentra PKL resmi terbesar, yang dioverlay dengan lokasi pemukiman terbanyak atau pusat kota dengan sentra perdagangan. Lokasi wisata akan dijadikan unit observasi tambahan dengan alasan PKL mungkin ada di lokasi tersebut.

Data PKL kota Semarang dan lokasinya per kecamatan secara garis besar adalah sebagai berikut :

Kecamatan :		Jumlah PKL	Resmi
1.	Semarang Barat	776	315
2.	Semarang Timur	1557	1379
3.	Semarang Tengah	1399	994
4.	Semarang Utara	407	276
5.	Semarang Selatan	1060	536
6.	Candisari	45	15
7.	Gajahmungkur	136	12
8.	Gayamsari	325	130
9.	Pedurungan	331	138
10.	Genuk	235	76
11.	Tembalang	211	59
12.	Banyumanik	211	59
13.	Gunungpati	36	6
14.	Mijen	65	29
15.	Ngaliyan	329	274
16.	Tugu	22	3
Jumlah		7142	4301

Sumber : www.semarang.go.id (11/11/2003)

Catatan :

Dari 16 kecamatan PKL terbanyak masih didominasi daerah pemukiman lama, Semarang Barat, Selatan, Tengah dan Timur. Kecuali daerah Utara yang merupakan daerah pelabuhan, daerah pemukiman lama ini adalah downtown Semarang dengan ciri pusat perdagangan, pelayanan pemerintahan dan sarana umum lainnya.

Tiga daerah pemukiman baru : Ngaliyan, Gayamsari dan Pedurungan dipilih karena besarnya PKL resmi dan tumbuhnya pemukiman baru di daerah perluasan bagian timur dan barat. Data per kelurahan diambil

dari kelurahan dengan PKL besar (lebih dari 300), total PKL resmi besar (angka resmi PKL mulai 40., kecuali Kalipancur** yang angkanya 39 tetapi karena PKL tidak resminya 55, diikutkan dalam kelompok yang diobservasi).

PKL resmi dipilih sebagai obyek utama karena implikasi pada pengelolaan pedagang pemberian hak dan kewajiban, serta besar iuran (kalau ada) akan dikaitkan dengan teori secktor informasi dana keadaan PKL pada umumnya di daerah atau negara lain. PKL tidak resmi tidak diangkat penjelasan atau sebagai kelompok kontrol.

Kecamatan :

Kelurahan sentra PKL (PKL resmi)

1. Semarang Barat	Cabean (66), Salaman Mloyo (47), Krapyak (41), Gisikdrono (147)
2. Semarang Timur	Rejosari (384), Kr. Tempel (367), Mlatiharjo (155), Bugangan (329), Kr. Turi (76), Sarirejo (42).
3. Semarang Tengah	Kranggan (375), Prwdinatan (273), Kembangsari (187), Miroto (40)
4. Semarang Utara	Bulu Lor (240)
5. Semarang Selatan	Randusari (165), Pleburan (212), Lamper Lor (71), Lamper Kidul (87)
6. Gayamsari*	Pandean lamper (130)
7. Pedurungan*	Palebon (53), Gemah (45), Muktiharjo Kdl (40)
8. Ngaliyan	Purwoyoso (49), Kalipancur (39)**, Ngaliyan (50), Tambakhaji (71)

Sumber : www.semarang.go.id (11/11/2003)

Catatan :

Jumlah seluruh : 27 kelurahan. Sebenarnya, ada beberapa kelurahan dengan angka PKL lebih dari 40, tetapi karena kecamatannya tidak terpilih, maka kelurahan tersebut tidak dimasukkan ke dalam kelompok yang diobservasi.

Responden PKL akan dipilih masing-masing dua dari kelurahan terpilih : seorang *gatekeeper*, yaitu pimpinan kelompok, dan satu PKL yang cukup lama berlangsung di kelurahan tersebut, tidak melihat jenis barang dagangan dan modal berdagangnya.

Responden aparaturnya kelurahan dua orang dari sekretariat kelurahan dan pengelola PKL, sedangkan responden konsumen dua orang akan diambil *on the spot*, ketika melakukan transaksi, dan tidak melihat konsumen tersebut baru atau langganan lama.

Kelompok kontrol, PKL tidak resmi akan dipilih kemudian, sesuai dengan temuan lapangan pada kelompok resmi, dengan jumlah yang disesuaikan kemudian.

Aparat kota akan dijadikan nara sumber dan untuk konfirmasi tentang aturan yang diberlakukan untuk PKL resmi maupun tidak resmi.

SIMPULAN

Penelitian ini merupakan studi awal yang masih berlanjut, dan untuk kepentingan ilmiah maka diharapkan pemuatannya dalam jurnal daerah dapat memancing saran dan masukan dari berbagai pihak, terutama untuk poin faktor yang diteliti dan sumber bacaan. Selain itu, karena masalah PKL juga sudah menjadi masalah bagi kota-kota lain di Jawa Tengah, penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kepedulian pemerintah kota-kota tersebut terhadap perkembangan PKL di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, eds, Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.
- Larry S. Bourne, ed. Internal Structure of the City, Oxford, Toronto, 1871.
- Amos Rapoport, Human Aspects of Urban Form, Pergamon, 1977.
- Patrick McAuslan, Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Byorn Hettne, Ironi Pembangunan di Negara Berkembang, Sinar Harapan, 1985.
- Johan Silas, Kampung Surabaya Menuju Metropolitan, Yayasan Kel. Bhakti Surabaya, 1996.
- Lilli N. Scoch, Kaki Lima and Streethawkers in Indonesia, PT. Indira, Jakarta, 1985.
- Save M. Dagun, Sosio Ekonomi Analisis Eksistensi Kapitalisme dan Sosialisme, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Hans-Dieter Evers dan Rudiger Korff, Urbanisme di Asia Tenggara, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- James C. Synder dan Anthony J. Catanese, Perencanaan Kota, Ed 2, Erlangga, Jakarta, 1989.
- Eko Budiharjo, Tata Ruang Perkotaan, Alumni, Bandung, 1997.
- Edy Darmawan, Teori dan Kajian Ruang Publik Kota, BP UNDIP, Semarang, 2003.
- Sukanto Reksohadiprodjo dan AR. Karseno, Ekonomi Perkotaan, BPFE UGM, Yogyakarta, 1983.
- Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Kerja, Gramedia, Jakarta, 1996.
- Supratikno Raharjo, Peradaban Jawa, Kominitas Bambu, Jakarta, 2002.
- Alisyahbana, Urban Hidden Economy, Peran Tersembunyi Sektor Informal Perkotaan, ITS, Surabaya, 2003.

Makalah-makalah tentang PKL internasional
dari internet, terutama dari
www.openair.org.

Berita dan artikel dari koran dan majalah
tentang PKL, inter-nasional,
nasional, dan lokal.

Hasil penelitian tentang PKL di Indonesia,
atau word wide dan buku/
tulisan, terbitan tentang PKL/
sektor informal.

Data sekunder tentang PKL dari lokasi
penelitian.

dll.